



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017-2019;

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 9 / M . PAN / 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/ M . PAN / 11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2017-2019.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam sistem akuntabilitas kinerja dan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 22 Mei 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

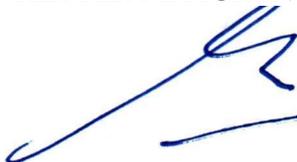
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1469

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



TRI ATMOJO SEIATI

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2017-2019

Daftar Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017-2019

I. Lembaga Administrasi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas kebijakan	Kualitas kebijakan publik instansi hasil binaan LAN	<p>Diukur melalui dua aspek: k</p> <p>rekomendasi kebijakan dan utilisasi kebijakan.</p> <p>a. Kemanfaatan rekomendasi kebij</p> <p>Diukur melalui pemenuhan k</p> <p>rekomendasi kebijakan setelah meliputi:</p> <p>a) Didiskusikan melalui seminar/ diskusi</p> <p>b) Diunduh oleh pihak pascapublikasi di media elektronik</p> <p>c) Dipublikasikan pada media massa tingkat lokal/ nasional</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>d) Dipublikasikan pada media elektronik tingkat lokal/nasional</p> <p>e) Diterima oleh <i>stakeholders</i> yang sebagai perhatian penyusunan/ perbaikan (dibuktikan dengan tanda pernyataan)</p> <p>Pemenuhan atas setiap aspek tersebut di atas diberikan nilai 0,20. Tingkat kemanfaatan diukur melalui nilai kemanfaatan dari setiap kebijakan di LAN. Rata-rata nilai direvaluasi sebagai berikut.</p> <p>0 - 0,25 - 0 - 2,5 >0,25 - 0,5 4 >2,5 - 5 >0,5 - 0,75 - 5 - 7,5 >0,75 - 1,0 - 7,5 - 10</p> <p>b. Tingkat utilitas analisis kebijakan Diukur melalui Indeks Utilitas Analisis K pada tahun berjalan.</p> <p>Nilai pada kedua aspek tersebut dirata-rata diinterpretasikan sebagai berikut.</p> <p>0 - 2,5 = Buruk >2,5 - 5 = Kurang baik 5 - 7,5 = Baik 7,5 - 10 = Sangat baik</p>
2	Meningkatnya kompetensi ASN	Tingkat efektivitas dan kualitas penyelenggaraan diklat oleh LAN dan lembaga penyelenggara diklat	Diukur melalui rumus sebagai berikut. $\frac{P3D + FWI + PKA + PTF + PPKN}{5}$

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
		<p>aparatur sesuai pedoman yang ditetapkan</p>	<p>P3D: Lembaga diklat yang akan meningkat dibagi jumlah lembaga yang diakreditasi pada tahun berjalan dikalikan 100.</p> <p>PWI: Tingkat pemahaman widyaiswara pembina kepegawaian atas kebijakan kepegawaian.</p> <p>PKA: Persentase alumni pelatihan ke tingkat I, II, III, dan IV yang diselenggarakan yang mengalami peningkatan kompetensi kinerja pascapelatihan diukur melalui pascadiklat 6 s.d. 12 bulan setelah diklat.</p> <p>PTF: Persentase alumni pelatihan fungsional yang menerapkan kompetensi manajerial, sosial kultural sesuai tujuan. Diukur melalui survey yang dilakukan 6 bulan setelah pelatihan. Diklat yang dilaksanakan adalah ToC, MoT, TOT Revolusi Mental, TRLA, dan RLA.</p> <p>PPK: Persentase ASN yang memiliki nilai baik hasil penilaian kompetensi yang dilaksanakan LAN.</p>
3	Meningkatnya pengembangan dan praktik inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah instansi pemerintah yang memanfaatkan model inovasi LAN	Diukur melalui jumlah K/L/D pemanfaatan yang dihasilkan melalui model inovasi yang dikembangkan oleh LAN.
4	Terwujudnya pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara	Persentase instansi pemerintah yang puas atas kualitas alumni STIA LAN	Diukur melalui survey kepuasan layanan yang dilakukan kepada unit kepegawaian pada instansi yang merencanakan pelatihan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			memanfaatkan alumni STIA LAN. dicantumkan adalah rata-rata dari ini diperoleh seluruh STIA LAN.
5	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga	Kualitas tata kelola internal LAN	<p>Diukur melalui formula sebagai berikut. $(RB + AKIP + BPK + SPIP) \times 5$</p> <p>RB= Predikat termutakhir evaluasi Birokrasi LAN. Dinilai sebagai berikut. AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2 C = 1 D = 0</p> <p>AKIP= Predikat termutakhir Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinilai sebagai berikut. AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2 C = 1 D = 0</p> <p>BPK= Opini BPK atas laporan keuangan. Dinilai sebagai berikut. WTP = 4 WTP-DPP = 3</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>WDP = 2 Tidak Wajar = 1 Disclaimer = 0 SPIP= Tingkat kematangan implementasi Dinilai sebagai berikut. Level 5 = 4 Level 4 = 3 Level 3 = 2 Level 2 = 1 Level 1 = 0</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formulir direvaluasi sebagai berikut. 75 s.d. 100 = Sangat Baik 50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk</p>

II. Deputi Bidang Kajian Kebijakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian kebijakan	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian kebijakan	<p>Diukur melalui pemenuhan rekomendasi kebijakan setelah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Didiskusikan melalui seminar/diskusi b. Diunduh oleh pihak pascapublikasi di media elektronik c. Dipublikasikan pada media massa tingkat lokal/nasional d. Dipublikasikan pada media

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>elektronik tingkat lokal/nasional e. Diterima oleh <i>stakeholders</i> yang sebagai perhatian penyusunan/perbaikan (dibuktikan dengan tanda pernyataan) Pemenuhan atas setiap aspek tersebut di atas diberikan nilai 0,20. Tingkat kemanfaatan diukur melalui nilai kemanfaatan dari setiap kebijakan di LAN. Rata-rata nilai diinterpretasikan sebagai berikut. 0 - 0,25 = tidak bermanfaat >0,25 - 0,5 = kurang bermanfaat >0,5 - 0,75 = bermanfaat >0,75 - 1,0 = sangat bermanfaat</p>
2	Terpenuhnya pemenuhan kebutuhan analisis kebijakan	Persentase pemenuhan kebutuhan analisis kebijakan (Tahap 1)	Kebutuhan analisis kebijakan pada tahun 2020) adalah 600 orang.
3	Tercapainya indeks utilisasi analisis kebijakan	Tingkat utilisasi analisis kebijakan	Diukur melalui Indeks Utilisasi Analisis pada tahun berjalan.

II.A. Pusat Kajian Reformasi Administrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang reformasi administrasi	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang reformasi administrasi yang menjadi wacana publik	<p>Rekomendasi kebijakan yang menjadi publik adalah dimuat/ diberitakan/ dipublikasikan sekurang-kurangnya 2 dan 3 media berita.</p> <ol style="list-style-type: none"> Media elektronik internal; Media massa cetak tingkat lokal dan/ atau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			c. Media massa elektronik lokal/ nasional.
2	Tersedianya <i>policy brief/ policy note</i> di bidang reformasi administrasi	Jumlah <i>policy brief/ policy note</i> di bidang reformasi administrasi yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	<i>Policy brief/ policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy brief/ policy note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (melalui tanda terima) dan/atau didiskusikan dalam seminar/diskusi yang mengundang K/L/ Pemda terkait.
3	Terselenggaranya layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi kajian kebijakan di bidang reformasi administrasi	Jumlah layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang reformasi administrasi	Diukur melalui jumlah layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi yang diterima oleh K/L/D pada tahun berjalan.
		Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang reformasi administrasi	Diukur melalui survey kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi pada tahun berjalan.

II.B. Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara yang menjadi wacana publik	Rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik adalah rekomendasi yang dimuat/diberitakan/dipublikasikan sekurang-kurangnya 2 dari 3 media berikut: a. Media elektronik internal; b. Media massa cetak tingkat lokal/ nasional; dan/ atau c. Media massa elektronik lokal/ nasional.
2	Tersedianya <i>policy brief/ policy note</i> di bidang sistem administrasi negara dan hukum	Jumlah <i>policy brief/ policy note</i> di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara	<i>Policy brief/ policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy brief/ policy note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
	administrasi negara	yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	melalui tanda terima) dan/atau di dalam seminar/diskusi yang mengundang K/L/Pemda terkait.
3	Terselenggaranya layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi kajian kebijakan di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara	Jumlah layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara	Diukur melalui jumlah advokasi/ fasilitasi/ asistensi yang kepada K/L/D pada tahun berjalan. Diukur melalui survey kepuasan layanan advokasi/fasilitasi/asistensi pada tahun berjalan.

II.C. Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi wacana publik	Rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik adalah dimuat/diberitakan/dipublikasikan sekurang-kurangnya 2 dari 3 media berikut: a. Media elektronik internal; b. Media massa cetak tingkat lokal/ nasional/ dan/ atau c. Media massa elektronik lokal/ nasional.
2	Tersedianya <i>policy brief/ policy note</i> di bidang desentralisasi dan otonomi daerah	Jumlah <i>policy brief/ policy note</i> di bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	<i>Policy brief/ policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy brief/ policy note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (melalui tanda terima) dan/atau di dalam seminar/diskusi yang mengundang K/L/Pemda terkait.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
3	Terselenggaranya layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi kajian kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah	Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang desentralisasi dan otonomi daerah	Diukur melalui jumlah advokasi/ fasilitasi/ asistensi yang kepada K/L/D pada tahun berjalan.
		Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang desentralisasi dan otonomi daerah	Diukur melalui survey kepuasan layanan advokasi/fasilitasi/asistensi pada tahun berjalan.

II.D. Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pembinaan analisis kebijakan yang berkualitas	Persentase norma dan kebijakan pembinaan analisis kebijakan yang dihasilkan	Jumlah norma dan kebijakan pembinaan kebijakan yang dimandatkan oleh Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2011 (enam) peraturan. Indikator ini diukur pemenuhan seluruh kebutuhan norma kebijakan pembinaan analisis kebijakan hingga akhir tahun berjalan.
2	Terlaksananya pengembangan analisis kebijakan berbasis kompetensi	Persentase analisis kebijakan yang dikembangkan kompetensinya	Diukur melalui jumlah analisis kebijakan dikembangkan dibagi jumlah analisis pada awal tahun dikali 100 persen. Jumlah AK dikembangkan 100%
3	Terpenuhinya kebutuhan analisis kebijakan di kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	Jumlah rekomendasi analisis kebijakan yang dihasilkan	Diukur melalui rekomendasi yang dihasilkan pada tahun berjalan berdasarkan uji coba calon analisis kebijakan, perpindahan atau inpassing .

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
4	Tersebarluaskannya informasi kebijakan	Jumlah publikasi Jurnal Analisis Kebijakan	Diukur melalui jumlah edisi publikasi Analisis Kebijakan.
5	Tersedianya sistem informasi yang andal, mudah, dan cepat	Kualitas sistem informasi jabatan fungsional analisis kebijakan	Diukur melalui survey persepsi pengkualitas sistem informasi jabatan fungsional analisis kebijakan. Pada tahun 2017, indikator ini diukur jumlah sistem informasi jabatan fungsional analisis kebijakan yang terbangun.
6	Terselenggaranya layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi kajian kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional analisis kebijakan	Jumlah layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi kajian kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional analisis kebijakan	Diukur melalui jumlah advokasi/ fasilitasi/ asistensi yang kepada K/L/D pada tahun berjalan.
7	Terselenggaranya evaluasi dan monitoring analisis kebijakan yang berkualitas	Kualitas pelayanan pembinaan analisis kebijakan	Diukur melalui survey kepuasan pembinaan analisis kebijakan, meliputi calon analisis kebijakan; kebijakan advokasi dan sosialisasi; pengembangan kebijakan (<i>seminar, public lecture, bimte</i>

III. Deputi Bidang Diklat Aparatur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya pembinaan dan penyelenggaraan kompetensi ASN yang berkualitas	Tingkat efektivitas dan kualitas penyelenggaraan diklat oleh LAN dan lembaga penyelenggara diklat aparatur sesuai pedoman yang ditetapkan	Diukur melalui rumus sebagai berikut. $(P3D + PWI + PKA + PTA + PPK)$ 5 P3D: Lembaga diklat yang akan meningkat dibagi jumlah lembaga diklat yang diakreditasi pada tahun berjalan dikali 1 PWI: Tingkat pemahaman widyaisw

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>pembina kepegawaian atas kebijakan pe widyaaiswara.</p> <p>PKA: Persentase alumni pelatihan ke tingkat I, II, III, dan IV yang diselengga yang mengalami peningkatan kompe kinerja pascapelatihan diukur melalu pascadiklat 6 s.d. 12 bulan setelah dikla</p> <p>PTF: Persentase alumni pelatihan t fungsional yang menerapkan kompete manajerial, social kultural sesuai tuju Diukur melalui survey yang dilakukar bulan setelah pelatihan. Diklat ya adalah ToC, MoT, TOT Revolusi Mental, revolusi mental, dan RLA.</p> <p>PPK: Persentase ASN yang memiliki k baik hasil penilaian kompetensi yang LAN.</p>

IV.A. Pusat Pen emban an Program dan Pembinaan Diklat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kiner'a Utama	Definisi dan Cara Pen• kuran
1	Terpenuhinya kebutuhan dokumen pengembangan kompetensi ASN	Jumlah kebijakan/pedoman/konsep/instrumen/uji coba kebijakan pengembangan kompetensi ASN	Diukur melalui jumlah kebijaka konsep/instrumen/uji coba kebijaka pengembangan kompetensi ASN yang pada tahun berjalan.
2	Terjaminnya kualitas lembaga diklat pemerintah (kepatuhan	Persentase lembaga diklat yang dipantau	Diukur melalui jumlah lemdik yang dipantau jumlah target lemdik yang dipantau pa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
	lembaga diklat terhadap standard)		berjalan dikali 100 persen.
3	Terakreditasinya lembaga diklat pemerintah	Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi	Diukur melalui jumlah lembaga kementerian / lembaga/ pemda yang diakreditasi sesuai target yang seharusnya akreditasi pada tahun berjalan.
4	Meningkatnya jejaring kerja Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat dengan <i>stakeholders</i>	Persentase lembaga diklat yang menerima sosialisasi/ bimtek kebijakan diklat	Diukur melalui jumlah lemdik yang m pembinaan sebagai peserta koordinasi/ sosialisasi/ workshop/ bim jumlah target lemdik pada tahun berjalan persen.
		Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Diklat Aparatur	Diukur melalui $E_{lerndik} \text{ menggunakan SIDA} \times 100\%$ <i>E lemdik terdapat tar SIDA</i> Kriteria: 90% s.d. 100% = Sangat Baik 80% s.d. <90% = Baik 70% s.d. <80% = Cukup Baik <70% = Kurang Baik

III.B. Pusat Pembinaan Wid aiswara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya kualitas kebijakan pembinaan dan pengembangan widyaiswara	Jumlah kebijakan / pedoman / konsep / instrumen / uji coba kebijakan pembinaan dan pengembangan kewidyaiswaraan	Diukur melalui jumlah kebijakan konsep/instrumen/uji coba kebijakan pembinaan kewidyaiswaraan yang diterb tahun berjalan.
		Persentase widyaiswara yang menerima pembinaan	Diukur melalui jumlah widyaiswara yang n pembinaan sebagai peserta rapat k sosialisasi/ workshop dibagi jumlah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			widyaiswara yang dibina pada tahun berjalan 100 persen.
2	Terwujudnya peningkatan kinerja widyaiswara	Persentase hasil evaluasi kinerja widyaiswara	Diukur melalui jumlah dokumen evaluasi yang berhasil diproses/dievaluasi dibagi dengan jumlah dokumen evaluasi kinerja Widyaiswara yang harusnya diproses / dievaluasi pada tahun berjalan dikali 100 persen.
3	Terwujudnya peningkatan layanan administrasi dan informasi kewidyaiswaraan	Tingkat kepuasan pelayanan kewidyaiswaraan	Diukur melalui survey kepuasan kewidyaiswaraan. Nilai yang dicantumkan adalah rata-rata hitung atas kepuasan pelayanan kewidyaiswara, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Seleksi calon widyaiswara; • Kebijakan pembinaan; • Pengembangan widyaiswara; dan • Dokumen penilaian kinerja widyaiswara

III.C. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan A aratur Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan diklat bahasa yang berkualitas	Persentase pelatihan kepemimpinan yang terselenggara sesuai standard	Diukur berdasarkan jumlah pelatihan kepemimpinan yang terselenggara sesuai ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan yang ditetapkan dibagi dengan jumlah seluruh pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan pada tahun berjalan dikali 100 persen.
2	Meningkatnya tingkat reaksi peserta atas penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan diklat bahasa	Tingkat reaksi peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan	Diukur melalui survey reaksi pada akhir penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan. Rata-rata nilai menjadi dasar pengukuran adalah rata-rata nilai reaksi peserta dari seluruh penyelenggara Diklat Kepemimpinan pada tahun berjalan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>Kriteria: 90 s.d. 100 = Sangat Baik 80 s.d. <90 = Baik 70 s.d. <80 = Cukup Baik <70 = Kurang Baik</p>
		Tingkat reaksi peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Bahasa	<p>Diukur melalui survey reaksi pada akhir penyelenggaraan Diklat Bahasa. Nilai yang dasar pengukuran adalah rata-rata seluruh peserta dari seluruh penyelenggaraan Diklat pada tahun berjalan.</p> <p>Kriteria: 90 s.d. 100 = Sangat Baik 80 s.d. <90 = Baik 70 s.d. <80 = Cukup Baik <70 = Kurang Baik</p>
3	Meningkatnya pemahaman atas produk pembelajaran dari peserta diklat kepemimpinan	<p>Persentase alumni Diklat Kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan</p> <p>Persentase alumni Diklat Kepemimpinan yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pascapelatihan</p>	<p>Diukur melalui jumlah alumni Diklat Kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan jangka pendek pascadiklat Kepemimpinan jumlah alumni Diklat Kepemimpinan dalam jangka pendek (s.d. 3 bulan) dikali 100 persen.</p> <p>Diukur melalui evaluasi pascadiklat yang dilakukan 6 s.d. 12 bulan setelah pelaksanaan Diklat Kepemimpinan. Apabila Diklat Kepemimpinan berakhir setelah bulan Mei, maka pengukuran indikator ini dilakukan pada tahun n+ 1.</p>

III.D. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional yang berkualitas	Persentase pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang terselenggara sesuai standard	Diukur berdasarkan jumlah pelatih fungsional, dan sosial kultural yang ter sesuai pedoman penyelenggaraan pelat telah ditetapkan oleh instansi pembi jumlah keseluruhan pelatihan teknis, f dan sosial kultural yang diselenggar tahun berjalan dikali 100 persen.
		Tingkat reaksi peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural	Diukur melalui survey reaksi pada akl penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsi sosial kultural. Nilai yang menja pengukuran adalah rata-rata seluru peserta dari seluruh penyelenggaraan teknis, fungsional, dan sosial kultural] berjalan. Kriteria: . 90 s.d. 100 = Sangat Baik EiD s.d. <90 = Baik ? 70 s.d. <80 = Cukup Baik <70 = Kurang Baik
		Tingkat pembelajaran (<i>learning</i>) peserta pascapelatihan teknis fungsional, dan sosial kultural	Diukur melalui uji pra dan pascapelatih fungsional, dan sosial kultural. P dicantumkan adalah persentase pes mengalami kenaikan tingkat pengetal uji pascapelatihan teknis.
		Persentase alumni pelatihan yang menerapkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tujuan pelatihan	Diukur melalui survey kompetensi pasca teknis, fungsional, dan sosial kultural. dilakukan kepada alumni dan/atau alumni setelah 6-9 bulan mengikuti p dengan target kompetensi yang direr

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			pada masing-masing pelatihan.

IV. Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya pengembangan dan praktik inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah satuan kerja di K/L/D (termasuk desa dan kelurahan) yang memanfaatkan inovasi administrasi negara	Diukur melalui jumlah satuan kerja di termasuk desa, yang memanfaatkan inovasi hasil Laboratorium Inovasi serta Desa dan Kelurahan (<i>Street Level Innovation</i>)

IV.A. Pusat Inovasi Tata Pemerintahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui inovasi sektor publik	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan inovasi yang dihasilkan bersama-sama pemerintah lain pada tahun berjalan model inovasi yang dikembangkan LAN.
		Jumlah model atau desain inovasi di bidang tata pemerintahan	Diukur melalui jumlah model atau desain di bidang tata pemerintahan yang dihasilkan tahun berjalan.
2	Tersedianya data dan informasi inovasi tata pemerintahan	<i>Updating</i> dokumentasi dan publikasi dari produk inovasi bidang tata pemerintahan	Diukur melalui jumlah informasi produk tata pemerintahan yang dipamerkan dokumen tercetak, dipublikasikan website/media sosial, dan diunduh oleh
3	Terlaksananya advokasi/asistensi/konsultasi bidang inovasi tata pemerintahan	Jumlah kegiatan advokasi/asistensi/konsultasi yang diberikan kepada instansi pemerintah	Diukur melalui jumlah layanan asistensi/konsultasi yang diberikan K/L/D pada tahun berjalan.

IV.B. Pusat Inovasi Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terciptanya inovasi pelayanan publik yang akuntabel, transparan, berkualitas	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan inovasi yang dihasilkan bersama-sama pemerintah lain pada tahun berjalan model inovasi yang dikembangkan LAN.
		Jumlah model atau desain inovasi di bidang pelayanan publik	Diukur melalui jumlah model atau desain di bidang pelayanan publik yang dihasilkan tahun berjalan.
2	Tersedianya data dan informasi inovasi pelayanan publik	<i>Updating</i> dokumentasi dan publikasi dari produk inovasi bidang pelayanan publik	Diukur melalui jumlah informasi produk pelayanan publik yang dipamerkan dokumen tercetak, dipublikasikan website/ media sosial, dan diunduh oleh publik.
3	Terlaksananya advokasi/asistensi/ konsultasi bidang inovasi pelayanan publik	Jumlah kegiatan advokasi/asistensi/ konsultasi yang diberikan kepada instansi pemerintah	Diukur melalui jumlah layanan asistensi/konsultasi yang diberikan K/L/D pada tahun berjalan.

IV.C. Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya inovasi di sektor publik berbasis <i>co-creation</i>	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan inovasi yang dihasilkan bersama-sama pemerintah lain pada tahun berjalan model inovasi yang dikembangkan LAN.
2	Tersedianya data dan informasi inovasi di sektor publik	<i>Updating</i> dokumentasi dan publikasi dari produk inovasi bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur	Diukur melalui jumlah informasi produk kelembagaan dan sumber daya aparatur dipamerkan dalam dokumen terdipublikasikan pada website/ media sosial dan diunduh oleh publik.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukur
3	Tersedianya saran dan rekomendasi isu-isu strategis di bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	Rekomendasi kebijakan yang didis kepada <i>stakeholders</i> adalah kebijakan yang diterima oleh K/L (dibuktikan melalui tanda terima) disampaikan dalam seminar/ diskusi mengundang pihak K/L/Pemda terkait.
4	Terlaksananya advokasi/asistensi/ konsultasi bidang inovasi kelembagaan dan sumber daya aparatur	Jumlah kegiatan advokasi/asistensi/ konsultasi yang diberikan kepada instansi pemerintah	Diukur melalui jumlah layanan asistensi/konsultasi yang diberikan K/L/D pada tahun berjalan.

IV.D. Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukur
1	Terlaksananya promosi inovasi dan pengembangan kapasitas di bidang administrasi negara	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan inovasi yang dihasilkan bersama-sama pemerintah lain pada tahun berjalan model inovasi yang dikembangkan LAN.
		Jumlah promosi inovasi administrasi negara	<p>Diukur melalui</p> $I = PIPC + PIP + PHI + PIS$ <ul style="list-style-type: none"> • PIPC : Jumlah produk inov dipamerkan (dokumen tercetak), • PIP : Jumlah produk inov dipublikasikan pada website, dan sosial • PIU : Jumlah inovasi yang diakses oleh publik • PIS: Jumlah produk inov

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukur
			disebarluaskan melalui kegiatan festival, gala meeting, dan lain-lain
2	Tersebarluaskannya data dan informasi produk inovasi administrasi negara	<i>Updating</i> dokumentasi dan publikasi dari produk inovasi bidang administrasi negara	Diukur melalui jumlah informasi produk administrasi negara yang dipamerkan dokumen tercetak, dipublikasikan website/media sosial, dan diunduh oleh
3	Terlaksananya kerja sama di bidang inovasi administrasi negara	Jumlah kerja sama di bidang inovasi administrasi negara	Diukur melalui jumlah perjanjian kerja sama (PKS) antara LAN dan instansi pemerintah di bidang inovasi administrasi negara ditandatangani pada tahun berjalan.
4	Terlaksananya advokasi/asistensi/konsultasi bidang inovasi administrasi negara	Jumlah kegiatan advokasi/asistensi/konsultasi yang diberikan kepada instansi pemerintah	Diukur melalui jumlah layanan asistensi/konsultasi yang diberikan K/L/D pada tahun berjalan.

V. Sekretariat Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukur
1	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional serta lembaga yang akuntabel dan bebas KKN	Kualitas tata kelola internal LAN	Diukur melalui formula sebagai berikut. $(RB + AKIP + BPK) \times 6,25$ RB= Predikat termutakhir evaluasi Birokrasi LAN. Dinilai sebagai berikut. AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2 C = 1 D = 0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>AKIP= Predikat termutakhir Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinilai sebagai berikut. AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2 C = 1 D = 0</p> <p>BPK= Opini BPK atas laporan keuangan Dinilai sebagai berikut. WTP = 4 WTP-DPP = 3 WDP = 2 Tidak Wajar = 1 Disclaimer = 0</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formulir direvaluasi sebagai berikut. 75 s.d. 100 = Sangat Baik 50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk</p>
		Tingkat kepuasan pengguna layanan Sekretariat Utama	Diukur melalui pengolahan data lanjut survey kepuasan pengguna layanan kerja di bawah Sekretariat Utama. Nilai diukur adalah rata-rata dari tingkat pada unit-unit kerja tersebut.

V.A. Biro Perencanaan Hukum Hubungan Masyarakat dan Protokol

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya pelayanan Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol yang responsif, cepat, tepat, partisipatif, dan akuntabel	Kualitas pengelolaan perencanaan, hukum, hubungan masyarakat, dan protokol	<p>Diukur melalui formula sebagai berikut. $(EWA + REV + RBA + RBH + RBO + LIP + PEGI + \dots) / DIPA$ DIPA= persentase deviasi halaman 3 DIPA. Dini berikut.</p> <p><20% = 4 20% - 25% = 3 <25% - 30% = 2 <30% - 35% = 1 >35% = 0</p> <p>REV= Jumlah rata-rata revisi anggaran seluruh Dinilai sebagai berikut. revisi = 4 7 - 8 revisi = 3 9 - 10 revisi = 2 10 - 11 revisi = 1 >11 revisi = 0</p> <p>RBA= Skor Reformasi Birokrasi pada pengungkit subkomponen penguatan akuntabilitas sebagai berikut.</p> <p>>5 s.d. 6 = 5 >4 s.d. 5 = 4 >3 s.d. 4 = 3 >2 s.d. 3 = 2 >1 s.d. 2 = 1 0 s.d. 1 = 0</p>

No	Sasaran Strate• is	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>RBH= Skor Reformasi Birokrasi pada pengungkit subkomponen penataan peraturan peundangan. Dinilai sebagai berikut.</p> <p>>4 s.d. 5 = 4 >3 s.d. 4 = 3 >2 s.d. 3 = 2 >1 s.d. 2 = 1 0 s.d. 1 = 0</p> <p>RBO= Skor evaluasi Reformasi Birokrasi pada pengungkit subkomponen penataan organisasi sebagai berikut.</p> <p>>5 s.d. 6 = 5 >4 s.d. 5 = 4 >3 s.d. 4 = 3 >2 s.d. 3 = 2 >1 s.d. 2 = 1 0 s.d. 1 = 0</p> <p>LIP= Diukur dari pemenuhan unsur-unsur Informasi Publik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambaran umum pelaksanaan pelayanan i publik • Rincian pelayanan permohonan informas • Rincian penyelesaian sengketa informas • Capaian, kendala, dan rencana tinda pelayanan informasi publik. <p>Pemenuhan setiap unsur memperoleh nilai 1, s nilai maksimal adalah 4.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>PEGI= Skor termutakhir pemeringkatan e-g Indonesia. Dinilai sebagai berikut.</p> <p>3,5 = 3 2,5 - 3,49 = 2 1,5 - 2,49 = 1 <1,5 = 0</p> <p>AA= Nilai termutakhir akreditasi kearsipan L pedoman yang ditetapkan oleh instansi kearsipan. Dinilai sebagai berikut.</p> <p>Terakreditasi AA = 4 Terakreditasi A = 3 Terakreditasi B = 2 Terakreditasi C = 1 Tidak Terakreditasi = 0</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formula di atas dir sebagai berikut.</p> <p>75 s.d. 100 = Sangat Baik 50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk</p>
		Tingkat kepuasan pengguna layanan Biro PH2P	Diukur melalui survey kepuasan pengguna lay PH2P, baik pengguna layanan individual pengguna layanan representasi unit kerja. diukur adalah rata-rata tingkat kepuasan layanan.

V.B. Biro Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya pelayanan Biro Umum yang responsif, tepat, partisipatif, akuntabel dan cepat, dan	Kualitas pengelolaan SDM, keuangan, pengadaan barang/jasa, dan barang milik negara	<p>Diukur melalui formula sebagai berikut. $(LK + RA + SDM + BMN + BD) \times 5$</p> <p>LK = Persentase laporan keuangan diselesaikan tepat waktu berdasarkan Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. sebagai berikut. 95%-100% tepat waktu = 4 90%-94% tepat waktu = 3 85%-89% tepat waktu = 2 80%-84% tepat waktu = 1 <80% tepat waktu = 0</p> <p>RA = Persentase penyerapan anggaran sebagai berikut. 90)/c, = 4 85% - 89,99% = 3 80% - 84,99% = 2 75% - 79,99% = 1 <75% = 0</p> <p>SDM = Persentase pelaksanaan pembinaan pegawai. Dinilai sebagai berikut. 90)/0 = 4 85% - 89% = 3 80% - 84% = 2 75% - 79% = 1 <75% = 0</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>BMN = Persentase laporan BMN disampaikan tepat waktu. Dinilai sebagai berikut. 95%-100% tepat waktu = 4 90%-94% tepat waktu = 3 85%-89% tepat waktu = 2 80%-84% tepat waktu = 1 <80% tepat waktu = 0</p> <p>BJ = Persentase realisasi pengadaan barang. Dinilai sebagai berikut. 95% = 4 90% - 94% = 3 85% - 89% = 2 80% - 84% = 1 <80% = 0</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formulir direvaluasi sebagai berikut. 75 s.d. 100 = Sangat Baik 50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk</p>
		Tingkat kepuasan pengguna layanan Biro Umum	Diukur melalui survey kepuasan layanan Biro Umum, baik pengguna individual maupun pengguna representasi unit kerja. Nilai yang diukur rata-rata tingkat kepuasan pengguna la

VI. Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di LAN yang transparan, akuntabel, dan bebas KKN serta independen	Tingkat efektivitas asistensi atas <i>risk management</i> dan hasil temuan	<p>Tingkat efektivitas asistensi atas risk management dan hasil temuan, diukur dari capaian komponen yaitu presentase tindak lanjut temuan, laporan hasil pemeriksaan diterbitkan, dokumen revidasi dan evaluasi berhasil diselesaikan, kesesuaian kontrol internal pengawasan, serta tingkat pengendalian intern di unit-unit kerja.</p> $TEARMHT = [THP \times 0,15] + [LHP \times 0,10,125] + [DE \times 0,125] + [PPPK \times 0,125] + [KPI \times 0,1] + [KKI \times 0,125] + [PPI \times 0,1]$ <p>THP = Persentase temuan hasil pemeriksaan dan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat ditindaklanjuti.</p> <p>LHP = Persentase dokumen laporan pemeriksaan yang diterbitkan dan ditindaklanjuti.</p> <p>DR = Persentase dokumen hasil revidasi diterbitkan.</p> <p>DE = Persentase dokumen evaluasi diterbitkan.</p> <p>PPPK = Persentase pemantauan pelaksanaan PPK.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>IACM = Nilai Internal Audit Capabili (IACM)</p> <p>KKI = Persentase kesesuaian kebijakan in bidang pengawasan.</p> <p>PPI = Tingkat penerapan pengendalian dikonversi sebagai berikut :</p> <p>5 unsur SPIP diterapkan = 100 4 unsur SPIP diterapkan = 90 3 unsur SPIP diterapkan = 80 2 unsur SPIP diterapkan = 70 1 unsur SPIP diterapkan = 60</p>

VII. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A)

VII.A. PKP2A I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik	Rekomendasi kebijakan yang menjadi publik adalah dimuat/ diberitakan/ dipublikasikan sekurang-kurangnya 2 dari 3 media berikut: a. Media elektronik internal; b. Media massa cetak tingkat lokal/nasional dan / atau c. Media massa elektronik lokal/ nasional.
		Jumlah <i>policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada	<i>Policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy br</i>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
		<i>stakeholders</i>	<i>note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (melalui tanda terima) dan/atau didalam seminar/diskusi yang mengundang K/ L/ Pemda terkait.
2	Meningkatnya kompetensi ASN	<p>Persentase alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pascapelatihan</p> <p>Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tujuan pelatihan</p> <p>Jumlah pegawai ASN yang dinilai kompetensinya</p>	<p>Diukur melalui evaluasi pascadiklat dilakukan 6 s.d. 12 bulan setelah pe Diklat Kepemimpinan. Apabila Kepemimpinan berakhir setelah bulan pengukuran atas indikator ini dilakukan tahun n+1.</p> <p>Diukur melalui survey kompetensi pasca teknis, fungsional, dan sosial kultural. dilakukan kepada alumni dan/ata alumni setelah 6-9 bulan mengikuti dengan target kompetensi yang dire pada masing-masing pelatihan.</p> <p>Diukur melalui jumlah pegawai pegawai LAN maupun pegawai pemerintah lainnya, yang diukur kom pada tahun berjalan.</p>
3	Terwujudnya pengembangan inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan inovasi yang dihasilkan bersama-sam pemerintah lain pada tahun berjalan model inovasi yang dikembangkan LAN.
4	Terselenggaranya layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Jumlah layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui jumlah advokasi/ fasilitasi/ asistensi yang kepada K/L/D pada tahun berjalan.

No	Sasaran Strate• is	Indikator Kiner a Utama	Definisi dan Cara Pen• kurar
		Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui survey kepuasan layanan advokasi/fasilitasi/asistensi pa berjalan.
5	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur PKP2A I yang profesional, serta akuntabilitas lembaga PKP2A I LAN	Kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A I	<p>Diukur melalui formula sebagai berikut.</p> $KUS = (SAKIP \times 0,3) + (RA \times 0,2) + (UP \times 0,1) + (SDM \times 0,3)$ <p>KUS = Kualitas tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A</p> <p>SAKIP = Nilai evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PKP2A sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.</p> <p>RA = Persentase realisasi anggaran</p> <p>UP = Persentase GUP yang tepat waktu</p> <p>DIPA = Gap antara realisasi dengan penarikan dana selama 1 tahun. Diir sesuai dengan instrumen evaluasi pe anggaran dari Kementerian Keuangan berikut.</p> <p><25% = 100 25% - 34,99% = 85 35% - 49,99% = 70 50% = 60</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>SDM = Persentase pegawai yang dike- kompetensinya. Pengembangan kompet- dilakukan melalui diklat, mentoring coaching, seminar, studi banding, bi- lain-lain.</p> <p>Nilai akhir dan penghitungan formu- direvaluasi sebagai berikut. 75 s.d. 100 = Sangat Baik 50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk</p>

VII.B. PKP2A II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik	<p>Rekomendasi kebijakan yang menjad- publik adalah dimuat/ diberitakan/ dipublikasikan sekurang-kurangnya 2 dari 3 media beri- a. Media elektronik internal; b. Media massa cetak tingkat lokal/ dan / atau c. Media massa elektronik lokal/ nasional.</p>
		Jumlah <i>policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	<i>Policy brief/policy note</i> yang didis- kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy br-</i> <i>note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (/ melalui tanda terima) dan/atau dis- dalam seminar/diskusi yang mengund- K/ L/ Pemda terkait.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
2	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pascapelatihan	Diukur melalui evaluasi pascadiklat dilakukan 6 s.d. 12 bulan setelah pe Diklat Kepemimpinan. Apabila Kepemimpinan berakhir setelah bulan pengukuran atas indikator ini dilaku tahun n+1.
		Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tujuan pelatihan	Diukur melalui survey kompetensi pasca teknis, fungsional, dan sosial kultural dilakukan kepada alumni dan/ata alumni setelah 6-9 bulan mengikuti dengan target kompetensi yang dire pada masing-masing pelatihan.
3	Terwujudnya pengembangan inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan da inovasi yang dihasilkan bersama-sam pemerintah lain pada tahun berjala model inovasi yang dikembangkan LAN.
4	Terselenggaranya layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Jumlah layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui jumlah advokasi/ fasilitasi/ asistensi yang kepada K/L/D pada tahun berjalan.
		Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui survey kepuasan layanan advokasi/ fasilitasi/asistensi pa berjalan.
5	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur PKP2A II yang profesional, serta akuntabilitas lembaga PKP2A II LAN	Kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A II	Diukur melalui formula sebagai berikut. $KUS = (SAKIP \times 0,3) + (RA \times 0,2) + (U) + (DIPA \times 0,1) + (SDM \times 0,3)$

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>KUS = Kualitas tata kelola urusan kesek di PKP2A</p> <p>SAKIP = Nilai evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PKP2A sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.</p> <p>RA = Persentase realisasi anggaran</p> <p>UP = Persentase GUP yang tepat waktu</p> <p>DIPA = Gap antara realisasi dengan penarikan dana selama 1 tahun. Diir sesuai dengan instrumen evaluasi pe anggaran dari Kementerian Keuanga berikut.</p> <p><25% = 100 25% - 34,99% = 85 35% - 49,99% = 70 ?50% = 60</p> <p>SDM = Persentase pegawai yang dike kompetensinya. Pengembangan kompet dilakukan melalui diklat, mentoring coaching, seminar, studi banding, bi lain-lain.</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formul direvaluasi sebagai berikut.</p> <p>75 s.d. 100 = Sangat Baik</p>

No	Sasaran Strate:is	Indikator Kiner'a Utama	Definisi dan Cara Pen kuran
			50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk

VII.C. PKP2A III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik	Rekomendasi kebijakan yang menjadi publik adalah dimuat/ diberitakan / dipublikasikan sekurang-kurangnya 2 dari 3 media berikut: a. Media elektronik internal; b. Media massa cetak tingkat lokal/ dan/ atau c. Media massa elektronik lokal/ nasional.
		Jumlah <i>policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	<i>Policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy brief/policy note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (melalui tanda terima) dan/atau didiskusikan dalam seminar/diskusi yang mengundang K/ L/ Pemda terkait.
2	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pascapelatihan	Diukur melalui evaluasi pascadiklat dilakukan 6 s.d. 12 bulan setelah pelaksanaan Diklat Kepemimpinan. Apabila Diklat Kepemimpinan berakhir setelah bulan pengukuran atas indikator ini dilakukan tahun n+1.
		Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkan	Diukur melalui survey kompetensi pascapelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
		kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tujuan pelatihan	dilakukan kepada alumni dan/atau alumni setelah 6-9 bulan mengikuti dengan target kompetensi yang direncanakan pada masing-masing pelatihan.
3	Terwujudnya pengembangan inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan inovasi yang dihasilkan bersama-sama pemerintah lain pada tahun berjalan model inovasi yang dikembangkan LAN.
4	Terselenggaranya layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Jumlah layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui jumlah advokasi/ fasilitasi/ asistensi yang dilakukan kepada K/L/D pada tahun berjalan.
		Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui survey kepuasan layanan advokasi/fasilitasi/asistensi pada tahun berjalan.
5	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur PKP2A III yang profesional, serta akuntabilitas lembaga PKP2A III LAN	Kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A III	<p>Diukur melalui formula sebagai berikut.</p> $KUS = (SAKIP \times 0,3) + (RA \times 0,2) + (UI \times 0,2) + (DIPA \times 0,1) + (SDM \times 0,3)$ <p>KUS = Kualitas tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A</p> <p>SAKIP = Nilai evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PKP2A sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan.</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>RA = Persentase realisasi anggaran</p> <p>UP = Persentase GUP yang tepat waktu</p> <p>DIPA = Gap antara realisasi dengan penarikan dana selama 1 tahun. Diisi sesuai dengan instrumen evaluasi pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan berikut.</p> <p><25% = 100 25% - 34,99% = 85 35% - 49,99% = 70 ?_50% = 60</p> <p>SDM = Persentase pegawai yang dikembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui diklat, mentoring, coaching, seminar, studi banding, dan lain-lain.</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formulir dievaluasi sebagai berikut.</p> <p>75 s.d. 100 = Sangat Baik 50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk</p>

VII.D. PKP2A IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik	Rekomendasi kebijakan yang menjadi publik adalah dimuat/ diberitakan / dipublikasikan sekurang-kurangnya 2 dan 3 media berikut: a. Media elektronik internal; b. Media massa cetak tingkat lokal/ dan / atau c. Media massa elektronik lokal/ nasional.
		Jumlah <i>policy brief/ policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	<i>Policy brief/ policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy brief/ policy note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (melalui tanda terima) dan/atau didiskusikan dalam seminar/diskusi yang mengundang K/ L/ Pemda terkait.
2	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pascapelatihan	Diukur melalui evaluasi pascadiklat dilakukan 6 s.d. 12 bulan setelah pelaksanaan Diklat Kepemimpinan. Apabila Diklat Kepemimpinan berakhir setelah bulan pengukuran atas indikator ini dilakukan tahun n+1.
		Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tujuan pelatihan	Diukur melalui survey kompetensi pascapelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural dilakukan kepada alumni dan/atau mahasiswa setelah 6-9 bulan mengikuti dengan target kompetensi yang direncanakan pada masing-masing pelatihan.
3	Terwujudnya pengembangan inovasi di bidang administrasi	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan produk inovasi yang dihasilkan bersama-sama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukur
	negara		pemerintah lain pada tahun berjalan model inovasi yang dikembangkan LAN.
4	Terselenggaranya layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	<p>Jumlah layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara</p> <p>Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara</p>	<p>Diukur melalui jumlah advokasi/ fasilitasi/ asistensi yang kepada K/L/D pada tahun berjalan.</p> <p>Diukur melalui survey kepuasan layanan advokasi/fasilitasi/asistensi pa berjalan.</p>
5	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur PKP2A IV yang profesional, serta akuntabilitas lembaga PKP2A IV LAN	Kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A IV	<p>Diukur melalui formula sebagai berikut.</p> $KUS = (SAKIP \times 0,3) + (RA \times 0,2) + (UP \times 0,1) + (DIPA \times 0,3)$ <p>KUS = Kualitas tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A</p> <p>SAKIP = Nilai evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PKP2A sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.</p> <p>RA = Persentase realisasi anggaran</p> <p>UP = Persentase GUP yang tepat waktu</p> <p>DIPA = Gap antara realisasi dengan penarikan dana selama 1 tahun. Diin</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>sesuai dengan instrumen evaluasi pe anggaran dari Kementerian Keuanga berikut. $<25\% = 100$ $25\% - 34,99\% = 85$ $35\% - 49,99\% = 70$ $50\% = 60$</p> <p>SDM = Persentase pegawai yang dike kompetensinya. Pengembangan kompet dilakukan melalui diklat, mentoring coaching, seminar, studi banding, bi lain-lain.</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formul direvaluasi sebagai berikut. $75 \text{ s.d. } 100 = \text{Sangat Baik}$ $50 \text{ s.d. } <75 = \text{Baik}$ $25 \text{ s.d. } <50 = \text{Buruk}$ $0 \text{ s.d. } <25 = \text{Sangat Buruk}$</p>

VIII. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

VIII.A. STIA LAN Jakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi di STIA LAN	Persentase lulusan STIA dengan IPK Baik dan masa studi normal	Diukur dengan kriteria sebagai berikut. Lulusan S 1: IPK minimal 3,00; masa st masa studi maksimal (12 semester) Lulusan S2: IPK minimal 3,25; masa st

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			masa studi maksimal (8 semester) Nilai yang diukur adalah hasil pembulusan yang memenuhi kriteria tersebut dibandingkan dengan total lulusan pberjalan dikali 100 persen.
		Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam media ilmiah/publikasi nasional/internasional	Diukur berdasarkan jumlah karya ilmiah dihasilkan oleh pegawai ASN di STIA L dipublikasikan dalam media ilmiah nasional/internasional pada tahun berjalan Jenis-jenis publikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Buku/bunga rampai/ proceeding (ISBN) • Jurnal/berkala ilmiah (memiliki)
		Tingkat kemanfaatan pengabdian masyarakat yang dilakukan STIA	Diukur melalui survey persepsi penerima pengabdian masyarakat.
		Persentase dosen yang telah tersertifikasi	Diukur melalui jumlah dosen tersertifikasi dibagi jumlah total dosen ter

VIII.B. STIA LAN Bandun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi di STIA LAN	Persentase lulusan STIA dengan IPK Baik dan masa studi normal	Diukur dengan kriteria sebagai berikut. Lulusan S 1: IPK minimal 3,00; masa studi masa studi maksimal (12 semester) Lulusan S2: IPK minimal 3,25; masa studi masa studi maksimal (8 semester) Nilai yang diukur adalah hasil pembulusan yang memenuhi kriteria tersebut dibandingkan dengan total lulusan p

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			berjalan dikali 100 persen.
		Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam media ilmiah/ publikasi nasional/internasional	Diukur berdasarkan jumlah karya ilmiah dihasilkan oleh pegawai ASN di STIA LAN dipublikasikan dalam media ilmiah nasional/internasional pada tahun berjalan Jenis-jenis publikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Buku/bunga rampai/ proceeding (ISBN) • Jurnal/berkala ilmiah (memiliki
		Tingkat kemanfaatan pengabdian masyarakat yang dilakukan STIA	Diukur melalui survey persepsi penerima pengabdian masyarakat.
		Persentase dosen yang telah tersertifikasi	Diukur melalui jumlah dosen tersertifikasi dibagi jumlah total dosen terdapat di STIA LAN dikali 100 persen.

VIII.C. STIA LAN Makassar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi di STIA LAN	Persentase lulusan STIA dengan IPK Baik dan masa studi normal	Diukur dengan kriteria sebagai berikut. Lulusan S 1: IPK minimal 3,00; masa studi maksimal (12 semester) Lulusan S2: IPK minimal 3,25; masa studi maksimal (8 semester) Nilai yang diukur adalah hasil pembelajaran yang memenuhi kriteria tersebut dibandingkan dengan total lulusan yang berjalan dikali 100 persen.
		Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam media ilmiah/ publikasi nasional/internasional	Diukur berdasarkan jumlah karya ilmiah dihasilkan oleh pegawai ASN di STIA LAN dipublikasikan dalam media ilmiah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			nasional/internasional pada tahun berjalan Jenis-jenis publikasi: <ul style="list-style-type: none">• Buku/bunga rampai/proceeding (ISBN)• Jurnal/berkala ilmiah (memiliki ISSN)
		Tingkat kemanfaatan pengabdian masyarakat yang dilakukan. STIA	Diukur melalui survey persepsi penerima pengabdian masyarakat.
		Persentase dosen yang telah tersertifikasi	Diukur melalui jumlah dosen tersertifikasi dibagi jumlah total dosen terakreditasi x 100 persen.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

TRI ATMOJO SEJATI